


China Sebut Pihak yang Manfaatkan Hongkong Pion Geopolitik Itu Musuh Nyata

 **Realitarakyat.com** – China menegaskan bahwa pihak yang ingin memanfaatkan Hong Kong sebagai pion dalam geopolitik adalah musuh nyata.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Kantor Penghubung Hong Kong untuk China Luo Huining, Sabtu (12/6). Dalam sebuah forum, ia mengatakan bahwa Hong Kong dulunya adalah bekas jajahan Inggris lalu dikembalikan ke pemerintah China pada 1997.

Kini, tempat tersebut telah berkembang menjadi pusat keuangan dan menjadi salah satu pusat perekonomian paling kompetitif di dunia, seperti dilaporkan South China Morning Post.

Ia menilai bahwa ada pihak yang berusaha memanfaatkan Hong Kong sebagai pion geopolitik untuk menghancurkan pondasi yang sudah dibangun.

“Mereka yang mencoba mengubah Hong Kong menjadi pion dalam geopolitik, ingin menjadikan Hong Kong sebagai alat untuk mengekang China, serta jembatan untuk menyusup ke daratan China, sedang menghancurkan pondasi satu negara, dua sistem,” ujar Luo Huining dikutip dari Reuters.

Huining merujuk pada peran Hong Kong sebagai negara bebas yang menjadi pusat keuangan sebagaimana telah disepakati sejak Inggris menyerahkan kembali Hong Kong ke tangan China.

“Mereka adalah musuh nyata kemakmuran dan stabilitas Hong Kong,” katanya, tanpa mengidentifikasi orang atau kelompok mana pun.

Huining juga menyebut bahwa Partai Komunis yang bermarkas di Beijing merupakan pembela sejati dari status negara tersebut.

Ia bahkan menyebut mereka sebagai pencipta, pemimpin, pelaksana dan pembela dari konsep satu negara dua sistem yang ada di Hong Kong.

Kendati demikian, banyak penduduk Hong Kong yang selama beberapa tahun terakhir khawatir dengan sikap Beijing yang dinilai justru berbalik membatasi kebebasan mereka.

Kantor Penghubung Hong Kong untuk China tidak merespons saat diminta konfirmasi. Kantor itu juga tidak bersedia menanggapi pertanyaan yang dikirim melalui faks.

Seperti yang telah ramai diberitakan dalam beberapa tahun terakhir, Hong Kong telah dilanda demo pro-demokrasi atau demo anti-pemerintah sejak 2014 silam. Hal ini menimbulkan kegelisahan di antara banyak penduduk Hong Kong.

Demo tersebut dipicu rasa marah warga yang menuntut pemimpin kota Hong Kong, Leung Chun-ying untuk mundur dari jabatannya.

Kemudian pada 2019, Kerusuhan di Hong Kong semakin membesar setelah dipicu oleh rencana pemerintah untuk menerapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi pelaku kriminal ke daratan China. Undang-undang ini dipandang banyak orang sebagai ancaman bagi cara hidup mereka.

Akibatnya, pemerintah China memberlakukan undang-undang keamanan nasional secara besar-besaran untuk menghambat gerakan pro-demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran baru tentang prospek kota itu.

Massa pro-undang-undang itu juga mengklaim telah memulihkan ketertiban dan meningkatkan prospek ekonomi Hong Kong.

Huining bahkan menilai kondisi perekonomian Hong Kong kini termasuk di antara yang paling kompetitif di dunia meskipun ada kekhawatiran akan memburuk di bawah pemerintahan China.[prs]